

# KAJIAN SINERGITAS PERENCANAAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM

2021



BAPPEDA  
KABUPATEN BANDUNG

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang dalam kami haturkan kepada Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya kami akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Akhir untuk kegiatan Penyusunan Kajian Sinergitas Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam tahun Anggaran 2021.

Penyusunan laporan kajian sinergitas perencanaan SDA ini dimaksudkan untuk merumuskan rencana kegiatan untuk masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas masing-masing dan pewartuannya yang didasarkan pada kajian-kajian yang sebelumnya perlah dilaksanakan terkait sumber daya alam.

Besar harapan kami bahwa dengan adanya laporan kajian sinergitas perencanaan sumber daya ala mini perangkat daerah memiliki dasar sebagai bahan rencana tindak dan pelaksanaan program dna kegiatan dalam mendukung pengembangan sumber daya alam di Kabupaten Bandung.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan laporan ini. semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua.

Soreang, Desember 2021

Widiastuti Arini, S.T., M.M

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b><i>iii</i></b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b><i>v</i></b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b><i>vi</i></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b><i>2</i></b>
<b>BAB II TINJAUAN RENCANA DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b><i>3</i></b>
<b>2.1 TINJAUAN KEBIJAKAN NASIONAL .....</b>	<b><i>3</i></b>
<b>2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN REGIONAL.....</b>	<b><i>6</i></b>
<b>2.3 TINJAUAN KEBIJAKAN LOKAL.....</b>	<b><i>6</i></b>
<b>2.4 TINJAUAN KEBIJAKAN SEKTORAL .....</b>	<b><i>8</i></b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN BANDUNG .....</b>	<b><i>14</i></b>
<b>3.1 Kondisi Umum Kabupaten Bandung.....</b>	<b><i>14</i></b>
<b>3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan .....</b>	<b><i>16</i></b>
3.2.1 Daya Dukung Sumber Daya Air.....	<i>16</i>
3.2.2 Daya Dukung Pangan .....	<i>19</i>
<b>3.3 Pencemaran Air.....</b>	<b><i>21</i></b>
3.3.1 Pencemaran Air Limbah Pertanian .....	<i>21</i>
<b>3.4 Komoditas Utama Kabupaten Bandung.....</b>	<b><i>23</i></b>
<b>3.5 Situasi Ketersediaan Pangan.....</b>	<b><i>25</i></b>
<b>3.6 Situasi Keterjangkauan Pangan .....</b>	<b><i>27</i></b>
<b>3.7 Situasi Konsumsi Pangan .....</b>	<b><i>28</i></b>
<b>3.8 Gambaran Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung.....</b>	<b><i>31</i></b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b><i>33</i></b>

4.1	Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	33
4.2	Sub Sektor Peternakan .....	34
4.3	Sub Sektor Perikanan .....	35
<b><i>BAB V RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) KABUPATEN BANDUNG .....</i></b>		
		<b>38</b>
5.1	Kesejahteraan Petani.....	38
5.2	Ketahanan Pangan .....	44
<b><i>BAB VI PENUTUP .....</i></b>		
		<b>57</b>

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 SKENARIO PENCAPAIAN TPB 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN.....	12
TABEL 2 KEBUTUHAN AIR BERSIH.....	17
TABEL 3 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR DAN TINGKAT KETERSEDIAAN AIR .....	19
TABEL 4 POTENSI BEBAN BOD TERNAK UNGGAS TAHUN 2018 .....	23
TABEL 5 KOMODITAS DI KABUPATEN BANDUNG.....	23
TABEL 6 KEMANDIRIAN PANGAN KABUPATEN BANDUNG.....	25
TABEL 7 PERKEMBANGAN SKOR PPH KABUPATEN BANDUNG.....	30
TABEL 8 SUB-SEKTOR PERTANIAN UNGGULAN BERDASARKAN KECAMATAN .....	39
TABEL 9 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	42
TABEL 10 KLASIFIKASI KAWASAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANDUNG .....	45

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 PETA SKL KEMAMPUAN KETERSEDIAAN AIR KABUPATEN BANDUNG .....	16
GAMBAR 2 PETA DAYA DUKUNG PANGAN BERDASARKAN STATUS DAYA DUKUNG KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG.....	20
GAMBAR 3 BEBAN PENCEMARAN AIR LIMBAH PERTANIAN 2018 .....	21

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pertanian memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergy. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pangan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak mudah dan pemerintah baik ditingkat nasional maupun daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan penemuan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang hingga tingkat perseorangan secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Kabupaten Bandung sendiri memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, salah satunya adalah upaya pencapaian PPH sesuai dengan harapan. Sebagai wilayah yang menjadi salah satu penopang pangan bagi Kota Bandung, ketahanan dan keamanan menjadi hal yang penting. Dalam berbagai aspek pada ketahanan dan keamanan pangan, Kabupaten Bandung masih memiliki beberapa masalah diantaranya adalah dalam hal ketersediaan, keamanan, konsumsi, tata ruang dan kelembagaan dalam bidang pangan. Beberapa permasalahan dalam urusan ketahanan dan keamanan pangan diantaranya adalah belum terintegrasinya sistem distribusi dan aksesibilitas pangan, untuk saat ini, urusan pangan masih menjadi hal yang sulit diwujudkan karena belum terciptanya kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan.

Dalam upaya memenuhi ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung, diperlukan sebuah upaya Bersama yang komprehensif dari berbagai pihak baik masyarakat, maupun pemerintah dalam mengelola sumber daya pangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan adanya kajian sinergitas terkait perencanaan Sumber Daya Alam (SDA). Dimana sinergitas ini dapat diartikan sebagai kegiatan gabungan atau Kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh sebab itu, seluruh komponen baik pemerintah maupun komponen masyarakat diharapkan dapat bersinergi agar tercapainya tujuan Bersama. Kajian sinergitas ini juga merupakan kajian yang didalamnya akan memuat mengenai kajian-

kajian lain yang pernah dilakukan sebelumnya. Dimana sebelumnya telah disusun beberapa kajian yang diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan Sumber Daya Alam dan investasi terutama dalam rangka mendukung pembangunan jangka menengah dan jangka pendek yang saat ini sedang dilaksanakan. Kajian-kajian yang digunakan dalam kajian sinergitas ini adalah Masterplan Perekonomian, Master Plan Pertanian Kabupaten Bandung, Dokumen Perencanaan Pangan Kabupaten Bandung, hingga kajian logistic peternakan dan perikanan. Namun beberapa kajian tersebut masih bersifat sectoral dan dari hasil kajian tersebut belum saling terintegrasi satu sama lainnya. sehingga belum terlihat adanya sinergitas antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan yang memerlukan adanya peran beberapa perangkat daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya kajian sinergitas atau sebuah dokumen perencanaan yang saling mensinergikan rencana-rencana yang sudah dihasilkan dari berbagai kajian yang berguna untuk mempermudah penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah. Kajian ini juga merupakan kajian yang berguna untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung 2021 – 2026 yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan Pada Kelompok Masyarakat Lemah** dengan sasaran meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat.

## 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud diselenggarakannya kegiatan **Penyusunan Kajian Sinergitas Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bandung** adalah untuk Menyusun rencana kegiatan untuk masing-masing perangkat daerah yang sudah saling terintegrasi sesuai dengan isu atau kebijakan yang dihasilkan dari kajian sebelumnya terkait sector Sumber Daya Alam dengan tugas masing-masing dan pewartuannya.

Dengan adanya kegiatan ini sasaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:

1. Tersusunnya kebijakan yang akan diintervensi oleh masing-masing perangkat daerah dan *stakeholder* lainnya.
2. Teridentifikasinya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang perlu dilibatkan dalam menjalankan kegiatan sebuah kebijakan di sektor Sumber Daya Alam.
3. Tersedianya pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan program dan kegiatan



## BAB II TINJAUAN RENCANA DAN KEBIJAKAN

### 2.1 TINJAUAN KEBIJAKAN NASIONAL

Tinjauan kebijakan pada tingkat nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2008-2028.

#### 1. RPJPN Tahun 2005 – 2025

RPJPN Tahun 2005-2025 tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. Di dalam RPJPN, tercantum visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan, yang mana arahan pembangunan untuk sumber daya alam dijelaskan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari misi **“mewujudkan bangsa yang berdaya-saing”**. Dimana sector pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

#### 2. RPJMN Tahun 2020 – 2024

RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dan terakhir dalam kerangka pentahapan pembangunan RPJPN 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

RPJMN Tahun 2020 – 2024 tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu

Indonesia Maju. Visi tersebut diwujudkan melalui misi RPJMD 2020 – 2024 melalui misi **“Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”**.

Terdapat 7 agenda utama dalam RPJMD 2020 – 2024, salah satunya yang berkaitan dengan sector pertanian adalah **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan”**. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

RPJMN 2020-2024 juga memuat arah pembangunan wilayah untuk wilayah Jawa-Bali. Arah pengembangan yang fokus pada ekonomi yaitu pengembangan sektor unggulan, yang mana proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, di Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabuapten Bandung antara lain:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Provinsi Jawa Barat yaitu: lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, emas, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional; dan
- 3) Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.

### **3. Indonesia 2045**

Wawasan Indonesia 2045 atau disebut sebagai Visi Indonesia 2045 adalah sebuah gagasan ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil dan Makmur. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah Menyusun empat pilar menuju Indonesia Emas 2045 yaitu:

1. Pembangunan Manusia Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Teknologi
- 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam kajian ini, akan mengacu pada **Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**. Dimana untuk mencapai Indonesia menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dapat digerakkan salah satunya adalah didukung oleh **Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan petani**. Ketahanan pangan ditingkatkan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan, menjaga swasembada karbohidrat dan protein, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, strategi yang akan digunakan adalah:

1. Integrasi Kebijakan hulu sampai hilir serta keterkaitan sector pertanian dengan industri dan jasa
2. Penguatan kelembagaan dan kewirausahaan petani
3. Peningkatan investasi dan infrastruktur penunjang pertanian
4. Peningkatan kualitas SDM dan pertanian
5. Peningkatan Produktivitas, pengendalian konversi lahan pertanian, dan pengembangan pertanian maritime
6. Pengembangan pusat Pendidikan dan teknologi pertanian (30 Pusat riset berbasis tropika dan 10 pusat riset basis dasar).

#### **4. RTRWN TAHUN 2008 – 2028**

RTRWN 2008-2028 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Terhadap RTRWN 2008-2028. Kabupaten Bandung dalam arahan RTRWN 2008-2028 memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) **Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya.** Kabupaten Bandung bersama dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi
- 2) **Kawasan Andalan Cekungan Bandung.** Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, dalam hal ini yang terletak di ruang darat, yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya, dengan sektor unggulan diantaranya:

- a. **Industri:** Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan;
  - b. **Pertanian:** Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian;
  - c. **Pariwisata:** Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata;
  - d. **Perkebunan:** Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan.
- 3) **Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung,** merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

## 2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN REGIONAL

Tinjauan kebijakan pada tingkat regional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

### 1. RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025

RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 dan perubahan pertama pada Perda Nomor 24 Tahun 2010, serta perubahan kedua pada Perda Nomor 7 Tahun 2019. Dalam RPJPD Jawa Barat 2005-2025, Visi Provinsi Jawa Barat adalah “**Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia**”. Fokus sektor ekonomi terdapat pada Misi Dua yaitu “Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah”.

## 2.3 TINJAUAN KEBIJAKAN LOKAL

Tinjauan kebijakan pada tingkat lokal meliputi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Bandung 2021 – 2026, serta RTRW Kabupaten Bandung 2009 – 2029.

### 1. RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005 – 2025

RPJPD Kabupaten Bandung diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 dan perubahannya pada perda nomor 14 tahun 2019. Visi Kabupaten Bandung untuk tahun 2005 – 2025 adalah **“Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025”**. Visi ini diwujudkan dalam 6 (enam) misi, dan khusus untuk sumber daya alam (SDA) akan mengacu pada misi 6 yaitu: **“Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing”**.

Kabupaten Bandung memiliki potensi di bidang pertanian, pariwisata, maupun industri dan bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (Koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan (OVOP), dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi keenam ini merupakan penjabaran dari visi Kerta Raharja yang memfokuskan pada pengembangan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, jasa, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal.

## **2. RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026**

Visi Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Dan misi yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung adalah pada Misi 5 yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip dan Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat lemah**. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan menjangkau perekonomian inklusif berkualitas.

Tujuan dan sasaran dari misi **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip dan Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat lemah** adalah sebagai berikut:

- Mengurangi tingkat kemiskinan daerah
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan
- Berkurangnya pengangguran

- Berkurangnya pengangguran
- Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Menurunnya masalah pangan daerah.

### 3. RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036

RTRW Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2036 diatur dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Tujuan penataan ruang Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 adalah **“Mewujudkan Sinergitas dan Kemandirian Pembangunan Wilayah Kabupaten Bandung sebagai Kawasan yang Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan”**.

Kebijakan Penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan Wilayah berdasarkan pembagian 8 (delapan) WP sesuai fokus pengembangan daerah untuk mewujudkan kemandirian dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan merata
2. Kebijakan pemantapan dan pengembangan struktur ruang yang sinergi sesuai fungsi pusat kegiatan, dan sistem sarana prasarana yang terpadu
3. Kebijakan pelestarian Kawasan Lindung dan Pengembangan Kawasan Budidaya dengan prinsip berkelanjutan
4. Kebijakan pengembangan Kawasan strategis sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan
5. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

## 2.4 TINJAUAN KEBIJAKAN SEKTORAL

### 1. Pertanian dan Perkebunan

Konsep pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bandung dituangkan dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung yang disusun Bappeda pada tahun 2017. Tujuan pengembangan kawasan Pertanian di kabupaten Bandung adalah membangun sektor pertanian termasuk sektor peternakan kabupaten Bandung sebagai sektor

yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif serta memiliki nilai strategis terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berbasis Pertanian/Peternakan. Tujuan khusus pembangunan sektor pertanian/ peternakan Kabupaten Bandung adalah:

- 1) Meningkatkan kontribusi terhadap keamanan pangan khususnya kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Indonesia melalui peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian/peternakan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pertanian/ peternakan melalui percepatan peluang untuk meningkatkan pendapatan yang berasal usaha pertanian/peternakan;
- 3) Meningkatkan Kuantitas dan kualitas produk ternak yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan baik untuk kebutuhan lokal ataupun kebutuhan ekspor;
- 4) Menciptakan pola pemanfaatan sumberdaya yang bersifat terintegrasi demi tercapainya keberlanjutan ekologis di dalam proses produksi pertanian/peternakan; serta,
- 5) Mempertahankan dan mengedepankan fungsi-fungsi sosial pertanian/ peternakan.

Berdasarkan tujuan dari pembangunan kawasan pertanian Kabupaten Bandung, terdapat beberapa sasaran yang diharapkan akan tercapai dalam jangka panjang. Beberapa sasaran utama yang akan dicapai diantaranya:

- 1) Tercapainya kecukupan konsumsi dan ketahanan pangan sesuai dengan norma gizi masyarakat Jawa Barat pada tahun 2022.  
Untuk jangka pendek, terciptanya peningkatan konsumsi pangan yang bersumber protein hewani dengan angka harapan minimal 4.28 % pertahun sampai tahun 2022.
- 2) Tercapainya tingkat kontribusi sektor pertanian/peternakan yang signifikan terhadap perokonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2022.  
Untuk jangka pendek, PDRB Sektor pertanian Kabupaten Bandung akan tumbuh minimal sebesar 8,11% dan peternakan sebesar 6.84 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (imbalan) bagi petani/peternak sebesar 4.96 % pertahun.
- 3) Tercapainya ketersediaan pangan dan ternak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan kabupaten Bandung tahun 2022 serta dapat menciptakan laju penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian dan peternakan sebesar 3.24 persen per tahun.

- 4) Terwujudnya agribisnis pertanian/ peternakan sebagai salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki kabupaten Bandung.
- 5) Terbentuknya kawasan pertanian/ peternakan kabupaten Bandung untuk pengembangan komoditas unggulan baik Tanaman/ternak.

## 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 merupakan agenda internasional yang melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Konsep TPB memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup. TPB terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang dijadikan tuntunan bagi berbagai pemangku kepentingan. Adapun dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat 1 Tujuan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk mencapai ketahanan pangan yaitu terdapat pada TPB 2 yaitu **“Menghilangkan kelaparan, mencapai Ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”**.

Hubungan TPB 2 Tanpa Kelaparan sebagai TPB prioritas sangat berkaitan erat secara positif terutama dengan target yang ada di TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, dan TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu TPB 2 Tanpa Kelaparan berkaitan juga secara positif dengan TPB 4 Pendidikan Berkualitas, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 5 Kesetaraan Gender, TPB 15 Ekosistem Darat, dan TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk memastikan ketahanan pangan yang menunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 2 yaitu *“Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”*, maka Skenario yang diperlukan dalam meningkatkan daya dukung pangan, adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan kecamatan yang memiliki potensi pangan melalui mekanisme insentif (khususnya bagi kecamatan yang memiliki daya dukung pangan yang tinggi) dan dis-insentif;
- Meningkatkan teknologi pertanian dan sumber daya manusia, guna mendorong sektor sosial ekonomi pertanian bagi masyarakat agar dapat mencapai kemandirian pangan.



- Stabilitas harga pangan dari tingkat produksi hingga konsumen, melalui pengawasan dan pemantauan pasar
- Meningkatkan potensi kebutuhan pangan selain beras, (seperti singkong, jagung, kentang) disesuaikan dengan karakteristik geografis.

Pemerintah Kabupaten sudah melakukan berbagai kebijakan rencana dan program dalam upaya untuk meningkatkan kebutuhan pangan, namun perlu adanya upaya tambahan sehingga dapat mencapai tujuannya.

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

Tabel 1 Skenario Pencapaian TPB 2 Menghilangkan Kelaparan

TARGET	INDIKATOR	OUTCOME	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) . 2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menjamin akses kebutuhan pangan bagi semua orang, menerapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produksi pangan serta insentif bagi petani yang memanfaatkan lahan LP2B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan</li> <li>• Meningkatkan akses pangan bagi semua orang</li> <li>• Memastikan keamanan dan ketahanan pangan sesuai kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengendalian kuantitas dan kualitas pangan yang beredar di masyarakat</li> <li>• Melestarikan dan menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</li> <li>• Meningkatkan sentra produk unggulan</li> <li>• Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan</li> <li>• Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, dan kehutanan</li> <li>• Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan</li> <li>• Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</li> <li>• Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</li> <li>• Program penanganan kerawanan pangan (Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, pengelolaan dan penyaluran pangan)</li> <li>• Program pengawasan keamanan pangan</li> <li>• Program Pemberdayaan farkir miskin melalui distribusi raskin, peningkatan petugas dan pemebrdayaan fakir miskin</li> </ul>

TARGET	INDIKATOR	OUTCOME	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
				pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2.c. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	2.2.2.c. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi, kualitas, inovasi dan nilai perikanan</li> <li>• Meningkatkan akses pangan bagi semua orang</li> <li>• Memastikan keamanan dan ketahanan pangan sesuai kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan budidaya perikanan</li> <li>• Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit ikan</li> <li>• Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Ketahanan pangan</li> <li>• Program Pengembangan Budidaya Perikanan</li> <li>• Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</li> <li>• Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</li> <li>• Program pengawasan keamanan pangan</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>

# **BAB III GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA ALAM**

## **KABUPATEN BANDUNG**

### **3.1 Kondisi Umum Kabupaten Bandung**

Kabupaten Bandung merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara Geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41' sampai dengan 7°,19' Lintang Selatan dan diantara 107°,22' sampai dengan 108°,5' Bujur Timur. Luas wilayah keseluruhan sebesar 1.762,39 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian diatas permukaan laut bervariasi antara 500 m sampai 1.800 m, dengan iklim tropis dan curah hujan rata-rata pada tahun 2017 adalah 180 mm dan rata-rata hujan perhari 11.17 mm/hari. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Lahan di Kabupaten Bandung digunakan sebagian besar sebagai Kawasan budidaya pertanian, yaitu seluas 53,22% dari luas keseluruhan Ha. Penggunaan lahan lainnya, yaitu kawasan lindung sebesar 33,83%, kawasan budidaya non pertanian 12,44%, dan kawasan lainnya 0,51%.

Jika dilihat dari sector yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung Adalah sector Industri Pengolahan, diikuti dengan sector perdagangan besar, sector pertanian. Sector pertanian nyatanya cukup berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Bandung karena merupakan sector terbesar ketiga yang berkontribusi terhadap PDRB. Kemudian melihat dari lahan yang digunakan, Kawasan budidaya pertanian mendominasi lahan di Kabupaten Bandung dengan persentase luas diatas 50%. Lahan budidaya yang luas ini menjadi potensi

besar bagi Kabupaten Bandung dalam pengelolaan pertanian. Selain dipengaruhi oleh penggunaan lahan, potensi pertanian juga dipengaruhi oleh topografi dari wilayah ini sendiri. Topografi yang dimiliki kabupaten Bandung bervariasi sehingga menyebabkan komoditas unggulan pertanian dari masing-masing wilayah juga bervariasi dan memiliki kekhasan sendiri.

Komoditas unggulan pertanian yang dimiliki Kabupaten Bandung tidak hanya diunggulkan di tingkat kabupaten, tetapi juga menembus tingkat provinsi dan nasional. Komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditas khas Kabupaten Bandung, dimana kekhasan tersebut dapat dilihat dari perbedaan karakteristik komoditas yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan daerah lainnya. Perbedaan karakteristik komoditas ini diantaranya berdasarkan jenis komoditas, besaran produksi serta cita rasa yang dimilikinya. Komoditas pertanian khas Kabupaten Bandung yang menjadi unggulan diantaranya yaitu stroberi, kopi serta sapi perah dan produk turunannya.

Kabupaten Bandung memiliki 2 kawasan Agropolitan yaitu:

a. Kawasan Agropolitan Ciwidey

Kawasan Agropolitan Ciwidey meliputi 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali. Secara umum kawasan Pacira memiliki banyak potensi pertanian dan peternakan. Untuk potensi pertanian terdapat tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan potensi peternakan terdapat sapi perah. Jenis komoditi unggulan yang paling banyak di wilayah Pacira untuk tingkat desa yaitu sapi perah tersebar di 19 desa, padi sawah tersebar di 18 desa, buncis, tomat dan cabe tersebar di 11 desa, alpukat dan pisang tersebar di 11 desa, teh rakyat tersebar di 9 desa, kopi tersebar di 7 desa, dan strawberry tersebar di 6 desa

b. Kawasan Agropolitan Pangalengan

Berdasarkan masterplan agropolitan Kecamatan Pangalengan 2006-2010 telah ditentukan tiga komoditas unggulan untuk sektor pertanian yaitu jagung, kentang dan kubis. Selain produk sayuran, Pangalengan memiliki beberapa potensi di sector perkebunan dan peternakan, yang meliputi:

- Perkebunan teh, baik milik swasta, negara, maupun perkebunan rakyat.
- Perkebunan kopi (sebagian besar milik masyarakat), dan
- Peternakan, dengan adanya industri makanan olahan seperti industri pembuatan dodol, karamel, kerupuk susu dsb

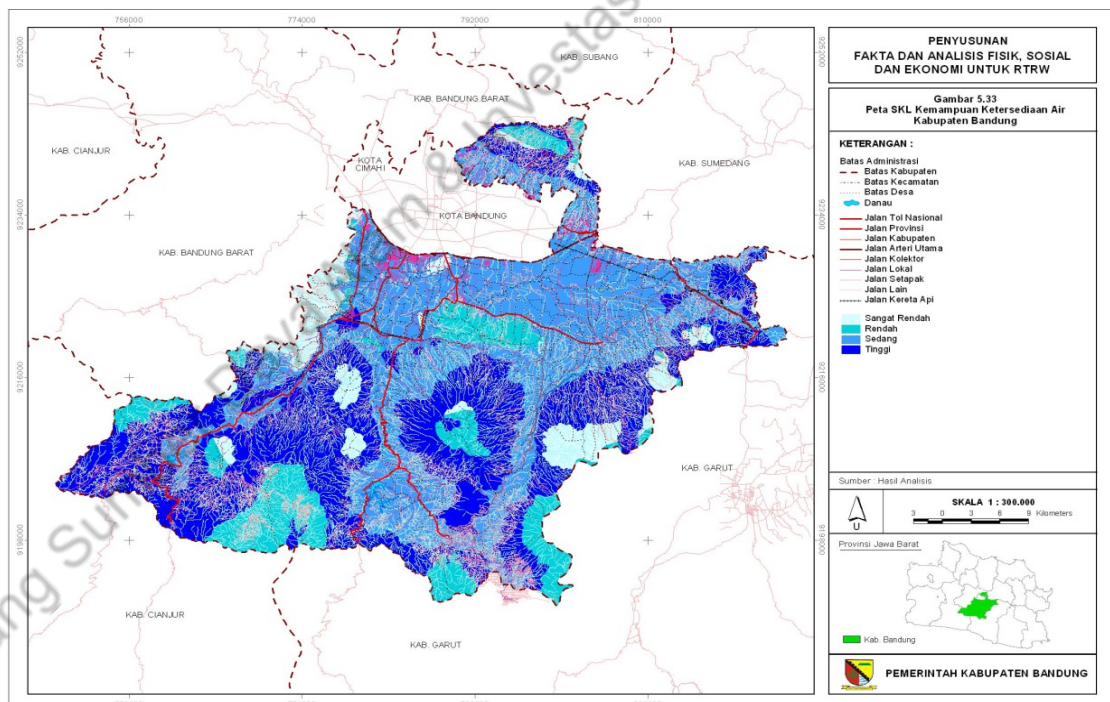
## 3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

### 3.2.1 Daya Dukung Sumber Daya Air

#### A. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Berdasarkan Dokumen KLHS Kabupaten Bandung (sumber: BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2021), menunjukkan bahwa peta satuan Kemampuan Lahan (SKL) kemampuan ketersediaan air di Kabupaten Bandung menggambarkan kondisi atau kategori lahan yang memiliki ketersediaan air rendah sampai tinggi. Kondisi lahan dengan SKL kategori tinggi berada di sebagian Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Nagrek, Kecamatan Pacet, Paseh. Bagian utara Kabupaten Bandung berada di sebagian Kecamatan Cimencyan, Cilengkrang, dan Kertasari. Sedangkan kategori sedang berada di Kecamatan Bojongsoang, Dayeuhkolot, Majalaya, Soreang, Katapang, Rancaekek, Banjaran, Ciparay, Cimaung Pasirjambu, Margaasih, Kutawaringin, Cileunyi. Kategori rendah berada di sebagian Kecamatan Pangalengan, Pasirjambu, Cimencyan, Baleendah, Ciparay, dan Kertasari. Kategori sangat rendah berada sebagian di Kecamatan Ibum, Soreang, Pasirjambu, dan Cikancung.

Gambar 1 Peta SKL Kemampuan Ketersediaan Air Kabupaten Bandung



(sumber: Buku KLHS Kabupaten Bandung, 2021)

#### B. Kebutuhan Air

Kebutuhan air terbanyak adalah air irigasi sawah dan perkebunan, sedangkan kebutuhan air yang memerlukan kualitas terbaik adalah air bersih untuk keperluan rumah tangga. Kebutuhan

air lainnya adalah air industri, serta peternakan dan perikanan. Kebutuhan air baku untuk rumah tangga dan industri dikategorikan air bersih, sedangkan kebutuhan lainnya dikategorikan air pertanian.

### B.1 Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam melangsungkan kegiatannya sehari-hari, sehingga pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketersediaan air bersih sangat tergantung kepada sumber air bersih yang dapat diolah dan dimanfaatkan dimana dalam penyediaannya air bersih dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kegiatannya serta sumber air yang ada. Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan kriteria sebagai berikut

- a) Kebutuhan air bersih per orang adalah 120 liter/hari.
- b) Kebutuhan non domestik adalah 20% dari total kebutuhan domestik.
- c) Asumsi kebocoran 15% dari total kebutuhan air bersih.

Berdasarkan kriteria tersebut maka hasil perhitungan kebutuhan air bersih pada tahun 2019 adalah 5,24 m<sup>3</sup>/detik, dan proyeksinya pada tahun 2030 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk adalah 6,14 m<sup>3</sup>/detik.

Tabel 2 Kebutuhan Air Bersih

No	Kecamatan	2019	2030
		m <sup>3</sup> /detik	m <sup>3</sup> /detik
1	Ciwidey	0,11	0,13
2	Rancabali	0,07	0,09
3	Pasirjambu	0,13	0,15
4	Cimaung	0,12	0,14
5	Pangalengan	0,22	0,26
6	Kertasari	0,10	0,12
7	Pacet	0,16	0,19
8	Ibun	0,12	0,14
9	Paseh	0,19	0,23
10	Cikancung	0,13	0,16
11	Cicalengka	0,18	0,21
12	Nagreg	0,08	0,09
13	Rancaekek	0,27	0,32
14	Majalaya	0,24	0,28

No	Kecamatan	2019	2030
		m <sup>3</sup> /detik	m <sup>3</sup> /detik
15	Solokanjeruk	0,12	0,14
16	Ciparay	0,24	0,28
17	Baleendah	0,38	0,45
18	Arjasari	0,15	0,17
19	Banjaran	0,18	0,22
20	Cangkuang	0,11	0,13
21	Pameungpeuk	0,11	0,13
22	Katapang	0,19	0,22
23	Soreang	0,17	0,20
24	Kutawaringin	0,15	0,17
25	Margaasih	0,22	0,26
26	Margahayu	0,19	0,22
27	Dayeuhkolot	0,18	0,21
28	Bojongsong	0,18	0,21
29	Cileunyi	0,29	0,34
30	Cilengkrang	0,08	0,09
31	Cimencyan	0,17	0,20
	<b>Jumlah</b>	<b>5,24</b>	<b>6,14</b>

Sumber: KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025

## B.2 Irigasi

Jumlah kebutuhan air irigasi untuk sawah di Kabupaten Bandung adalah 40,717 m<sup>3</sup>/detik.

Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)
Panen Padi	37.615
Tanam Padi	3.102
<b>Jumlah total</b>	<b>40.717</b>
Kebutuhan air l/detik/ha	1,00
<b>Jumlah kebutuhan air m<sup>3</sup>/detik/ha</b>	<b>40,717</b>

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025

## C. Daya Dukung Sumber Daya Air

Daya dukung sumber daya air (DDL-SDA) adalah ratio ketersediaan air dibagi jumlah kebutuhan air, yang dihitung berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi atau proyeksi yang akan datang. Berdasarkan Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025 menyebutkan bahwa untuk ketersediaan air dihitung berdasarkan debit baseflow atau Q80% dan Q50% yang



merupakan air tampungan bendungan atau waduk. Hasil analisis pada dokumen KHLS menunjukkan bahwa DDL-SDA pada Q80% proyeksi pada tahun 2030 menunjukkan bahwa sumber daya air permukaan di kabupaten bandung di musim kemarau saat ini kritis tidak mampu memenuhi kebutuhan semua penduduk di Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk DDL-SDA pada Q50% proyeksi 2030 menunjukkan apabila semua air sungai disimpan dalam waduk maka kebutuhan air terjamin bahkan terdapat kelebihan air.

Tabel 3 Proyeksi Kebutuhan Air dan Tingkat ketersediaan Air

Kebutuhan Air dan Daya Dukung SDA	2019	2030
	m <sup>3</sup> /detik	m <sup>3</sup> /detik
Air bersih	5,24	6,14
Air irigasi	40,717	40,717
Jumlah	45,96	46,86
Ketersediaan air Q 50 %	58,03	58,03
Ketersediaan air Q 80 %	36,11	36,11
Indeks Daya Dukung SDA Q50%	1,26	1,24
Indeks Daya Dukung SDA Q80%	<b>0,79</b>	<b>0,77</b>

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025

### 3.2.2 Daya Dukung Pangan

#### A. Daya Dukung Pangan

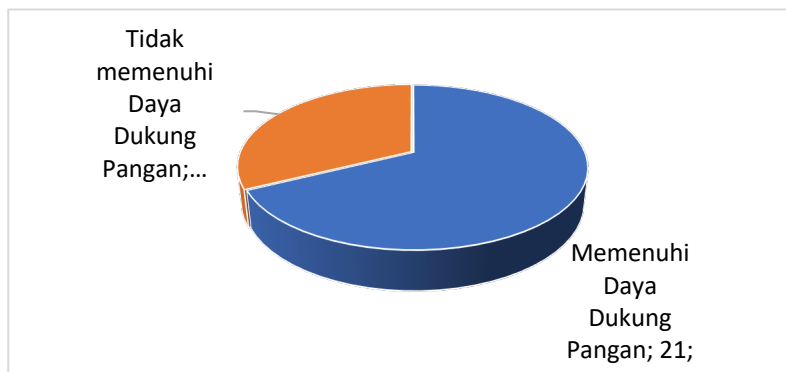
Daya Dukung pangan adalah kemampuan lahan dalam produksi beras dibagi konsumsi beras penduduk Kabupaten Bandung. Asumsi tingkat kebutuhan pangan yang paling pokok adalah beras.

*Daya dukung pangan di Kabupaten Bandung ialah tingkat produksi beras dibagi kebutuhan Konsumsi beras penduduk, menghasilkan indeks daya dukung pangan.*

***Daya Dukung Pangan Tinggi = DD Pangan ≥ 1***

***Daya Dukung Pangan Rendah = DD Pangan ≤ 1***

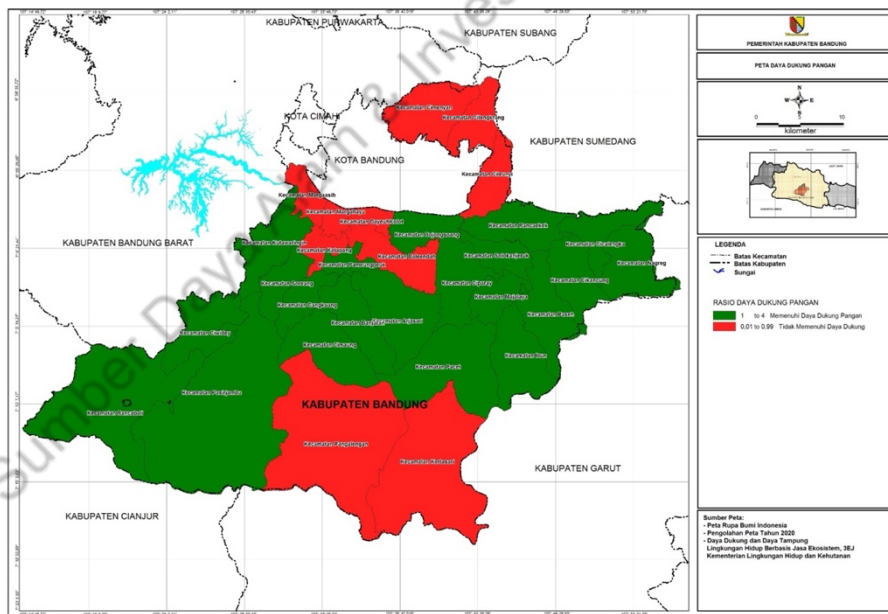
Grafik 1 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2020



Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025

Berdasarkan hasil analisis pada dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025 diketahui bahwa dari 31 Kecamatan, terdapat 10 Kecamatan yang tidak memenuhi Daya Dukung Pangan. Dan sebanyak 21 Kecamatan dapat memenuhi Daya dukung pangan. Berikut adalah pemetaan Daya dukung pangan berdasarkan status daya dukung kecamatan di Kabupaten Bandung

Gambar 2 Peta Daya Dukung Pangan Berdasarkan Status Daya Dukung kecamatan di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025

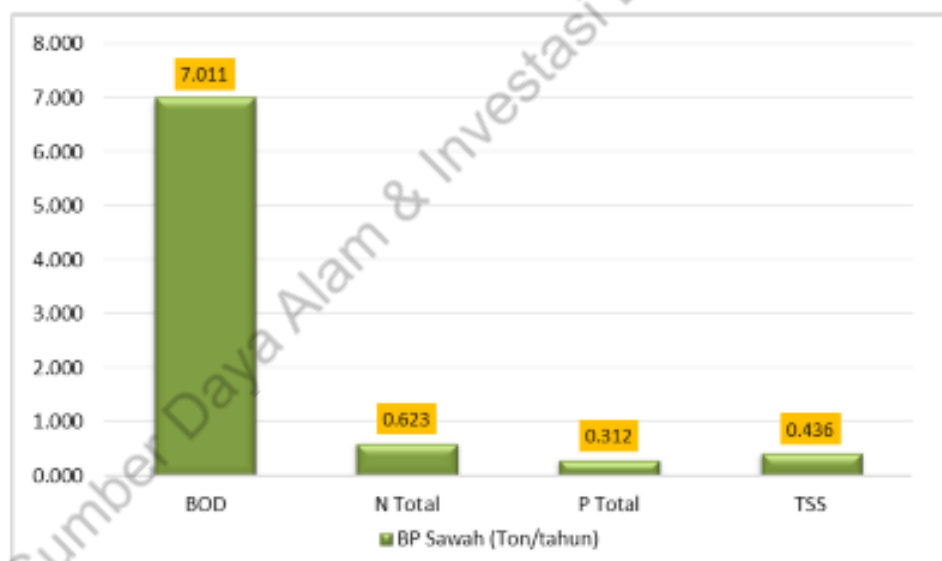
### 3.3 Pencemaran Air

#### 3.3.1 Pencemaran Air Limbah Pertanian

Berdasarkan Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025, kegiatan pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bandung berpotensi menghasilkan air limbah yang dapat mencemari badan air penerima/sungai. Potensi beban pencemar dalam air limbah pertanian sawah dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung yang luas tanam 92242 Ha dan Luas Panen 110646 Ha, masing-masing adalah 24.90 ton BOD/tahun, 1,845 ton Total N/tahun, 2.21 ton Total P/tahun, 1.11 ton Total P/tahun, 1.55 TonTSS/tahun, dan 17.70 m<sup>3</sup> pestisida / tahun. Pencemar-pencemar ini semuanya akan masuk ke perairan dan menambah beban pencemaran sungai.

Beban BOD air limbah pertanian sawah di Kabupaten Bandung sebesar 7011 ton/tahun, N/tahun sebesar 0,623 ton total, 0,312 ton/tahun P Total, dan TSS sebesar 0,436 ton/tahun TSS. Pencemar-pencemar ini semuanya akan masuk ke perairan dan menambah beban pencemaran sungai

Gambar 3 Beban Pencemaran Air Limbah Pertanian 2018



Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025

Beban pencemaran BOD dari air limbah pertanian yang paling tinggi berasal dari Kecamatan Rancaekek yaitu 1.74 Ton/tahun, mengingat di kecamatan inilah kegiatan panen padi paling luas dilaksanakan.

Pencemaran limbah pertanian terutama dari pemupukan yang mengandung senyawa P (phosphat) dapat memacu pertumbuhan alga dengan sangat cepat (alga blooming). Dampak

lebih lanjut akibat alga blooming ini adalah perairan menjadi kekurangan oksigen dan sinar matahari karena dipenuhi alga, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati biota air dan bisa mematikan perairan.

Meskipun beban pencemaran air dari limbah pertanian tidak semuanya memasuki perairan karena bergantung pada musim tanam dan musim hujan, namun nilai perkiraan tersebut dapat dijadikan acuan pengendalian beban pencemaran air sesuai dengan baku mutu air atau daya tampung pencemarannya.

### 3.3.2 Pencemaran Air Limbah Peternakan

Berdasarkan Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025 menyebutkan bahwa Air limbah dari kegiatan peternakan ini sangat berpotensi mencemari badan air penerima, mengingat masih banyak peternakan yang tidak melengkapi usaha/ kegiatannya dengan instalasi pengolahan limbah (IPAL). Sebagai contoh kegiatan peternakan di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, dan kecamatan-kecamatan lain, beberapa peternak membuang limbah ternaknya langsung ke saluran air yang kondisi awalnya relatif masih bersih karena berasal dari mata air Situ Cisanti. Saluran air yang melewati peternakan ini akan bergabung dengan saluran air dari Situ Cisanti yang masih bersih menuju Sungai Citarum bagian hulu.

Diketahui bahwa jenis hewan yang paling banyak ditanak di Kabupaten Bandung adalah sapi potong dan sapi perah. Potensi beban pencemar yang terdapat dalam air limbah peternakan adalah 20,368.92 Ton BOD/tahun, 50,958.11 Ton COD/tahun, 53.43 Ton Total N/tahun dan 9.81 Total P/tahun. Lihat Gambar berikut

Grafik 2 Beban Pencemaran BOD Ternak Sapi di Kabupaten Bandung 2018



Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Bandung 2021 – 2025

Sementara itu potensi Beban pencemar air limbah dari kegiatan peternakan unggas pun sangat besar mengingat jumlah unggas yang ditenakkan di Kabupaten Bandung sangat banyak mencapai 3,208,156 ekor. Dengan factor emisi beban pencemar seperti pada tabel berikut, perkiraan beban pencemar yang dikeluarkan ke lingkungan masing-masing sebesar 4917.23 Ton.

Tabel 4 Potensi Beban BOD Ternak Unggas Tahun 2018

Parameter	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Jumlah
Jumlah (ekor)	2069610	516837		621709	3208156
Beban Pencemar (Ton/tahun)					
BOD		4531.46		385.77	4917.23
COD		10573.40		1111.93	11685.32
Tot N		1.89		0.68	2.57
Tot P		2.83		1.13	3.97

Sumber :Hasil Perhitungan IKPLHD Kabupaten Bandung, 2020

### 3.4 Komoditas Utama Kabupaten Bandung

Untuk melihat kondisi pangan di Kabupaten Bandung, hal pertama yang perlu dilakukan adalah pembahasan mengenai komoditas pangan, situasi ketersediaan pangan, dan situasi konsumsi pangan. Untuk komoditas pangan, berdasarkan hasil analisis pada master plan pertanian di Kabupaten Bandung didapatkan bahwa komoditas utama pangan di Kabupaten Bandung adalah Padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Sedangkan untuk komoditas hortikultura, Berdasarkan dokumen perencanaan Pangan Kabupaten Bandung 2019, didapatkan bahwa komoditas hortikultura yang menjadi komoditas utama Kabupaten Bandung adalah Bawang Merah, cabe, kentang, tomat, kubis dan strawberry. Berikut adalah komoditas di Kabupaten Bandung beserta Kawasan pengembangannya yang dinilai bedasarkan produktivitasnya.

Tabel 5 Komoditas di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Sub sektor pertanian
1	Ciwidey	Perkebunan, peternakan, Buah-buahan
2	Rancabali	Perkebunan, Buah-buahan
3	Pasirjambu	Perkebunan, Buah-buahan
4	Cimaung	Tanaman Pangan, perikanan, Hortikultura, Buah-buahan

No	Kecamatan	Sub sektor pertanian
5	Pangalengan	Perkebunan, peternakan, Hortikultura, Buah-buahan
6	Kertasari	Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Buah-buahan
7	Pacet	Tanaman Pangan, Perkebunan, Biofarmaka, perikanan, Hortikultura, Buah-buahan
8	Ibun	Perkebunan, peternakan, Biofarmaka. Perikanan, Hortikultura, Buah-buahan
9	Paseh	Tanaman Pangan, Perkebunan, Biofarmaka, perikanan, Hortikultura, Buah-buahan
10	Cikancung	Perkebunan, Biofarmaka, Buah-buahan
11	Cicalengka	Tanaman Pangan
12	Nagreg	Tanaman Pangan, Biofarmaka, perikanan
13	Rancaekek	Tanaman Pangan, perikanan
14	Majalaya	Tanaman Pangan, perikanan
15	Solokanjeruk	Tanaman Pangan
16	Ciparay	Tanaman Pangan, Biofarmaka, perikanan
17	Baleendah	
18	Arjasari	Tanaman Pangan, peternakan, Hortikultura
19	Banjaran	Tanaman Pangan
20	Cangkuang	Biofarmaka
21	Pamengpeuk	
22	Katapang	
23	Soreang	Buah-buahan
24	Kutawaringin	Tanaman Pangan, Buah-buahan
25	Margaasih	
26	Margahayu	
27	Dayeuhkolot	
28	Bojongsoang	Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Sub sektor pertanian
29	Cileunyi	Biofarmaka, perikanan
30	Cilengkrang	Peternakan, Buah-buahan
31	Cimencyan	Biofarmaka, Hortikultura, Buah-buahan

### 3.5 Situasi Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan yang cukup kepada penduduk wilayah tersebut. ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan pangan, serta ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan ini bertujuan untuk menjamin pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk baik dari sisi jumlah, kualitas, keragaman, maupun keamanan. Ketersediaan pangan dapat dicukupi oleh wilayah jika produksi pangan dan cadangan pangan yang dimiliki cukup. Namun jika kedua sumber tersebut tidak mencukupi, wilayah tersebut dapat melakukan impor atau menerima barang dari wilayah lain.

Berdasarkan hasil kajian Dokumen Perencanaan Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2019 menunjukkan bahwa beberapa hasil produksi di sector pertanian ada yang mengalami surplus dan deficit. Yang artinya bahwa jenis pangan yang menunjukkan surplus menunjukkan bahwa produksi bersih pangan lebih tinggi dibanding konsumsi actual penduduk, sehingga memiliki daya dukung pangan yang baik. Sedangkan pangan deficit menunjukkan bahwa produksi bersihnya lebih rendah dari konsumsi actual penduduk sehingga memiliki daya dukung pangan yang kurang memadai.

Tabel 6 Kemandirian Pangan Kabupaten Bandung

Jenis Pangan	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Perimbangan	Keterangan
<b>Padi-padian</b>				
Beras	168,900.0	341,767.8	-174,371.6	Defisit
Jagung	9,500.0	1,977.8	7,522.2	Surplus
Terigu	0.0	80,359.2	-80,359.2	Defisit
<b>Umbi-umbian</b>				
Singkong	82,600.0	36,910.6	45,689.4	Surplus
Ubi Jalar	25,800.0	8,142.3	17,657.7	Surplus
Sagu	0.0	17,664.1	-17,664.1	Defisit
Kentang	80,500	395.0	80,105.0	Surplus
<b>Pangan Hewani</b>				

Jenis Pangan	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Perimbangan	Keterangan
Daging Ruminansia	5,000.0	16,021.9	-11,021.9	Defisit
Daging Unggas	21,600.0	37,545.0	-15,945.0	Defisit
Telur	6,800.0	32,770.1	-25,970.1	Defisit
Susu	50,600.0	12,476.8	38,123.2	Surplus
Ikan	13,700.0	50,243.9	-36,543.9	Defisit
<b>Minyak dan Lemak</b>				
Minyak Kelapa	0.0	0.0	0.0	
Minyak Lainnya	0.0	36,597.7	-36,597.7	Defisit
<b>Buah/Biji Berminyak</b>				
Kelapa	0.0	544.1	-544.1	Defisit
Kemiri	0.0	756.9	-756.9	Defisit
<b>Kacang-kacangan</b>				
Kacang Kedelai	700.0	30,743.2	-30,043.2	Defisit
Kacang Tanah	700.0	1,019.0	-319.0	Defisit
Kacang Hijau	0.0	2427.5	-2427.5	Defisit
<b>Gula</b>				
Gula Pasir	0.0	10,400.8	-10,400.8	Defisit

Sumber: Laporan Akhir Logistik Pangan Kabupaten Bandung

Dapat dilihat bahwa komoditas pangan yang surplus hanya jagung, singkong, ubi jalar, kentang, susu, dan sayur. Sedangkan komoditas lainnya mengalami defisit. Produksi di Kabupaten Bandung memang belum dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, khususnya untuk komoditas beras, sagu, daging ruminansia, daging unggas, telur, ikan, minyak sawit, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, gula, dan buah. Berdasarkan skor keragaman produksi umbian-umbian serta sayur dan buah, nilainya sudah maksimal, begitupula hasil perimbangan menunjukkan bahwa singkong, ubi jalar, kentang, dan sayur memiliki nilai surplus. Sagu termasuk pangan defisit karena produksinya tidak ada di Kabupaten Bandung

Pangan dengan daya dukung yang tinggi (surplus) dapat menjadi alternatif konsumsi pangan lain yang daya dukungnya rendah (defisit) pada kelompok yang sama. Selain itu, pemenuhan pangan dengan daya dukung rendah dapat disiasati dengan impor dari daerah lain. Jika melihat dari komoditas sayuran, kubis dan bawang merah merupakan komoditas utama di Kabupaten Bandung yang produksinya sangat besar dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya.



### 3.6 Situasi Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan adalah kemudahan penduduk dalam menjangkau pangan. Keterjangkauan ini meliputi kondisi fisik dan ekonomi dimana gangguan keterjangkauan tidak hanya pada jarak serta sarana dan prasarana tetapi juga situasi ekonomi penduduk. Kemiskinan menjadi salah satu faktor ketidakterjangkauan pangan dan keberagaman konsumsi pangan. Kemiskinan atau ketidaksejahteraan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Adapun standar untuk menentukan kemiskinan adalah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum baik untuk makanan maupun non makanan. Kebutuhan makanan disetarakan dengan 2,150 kilokalori perkapita perhari, sedangkan kebutuhan non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan. Selain itu, berdasarkan dokumen rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bandung, menyebutkan bahwa terdapat 9 indikator yang menjadi penilaian untuk indikator pilar keterjangkauan pangan yaitu (1) rasio warung terhadap Rumah Tangga dan (2) rasio tokok terhadap rumah tangga, (3) rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah; (4) rasio Rumah Tangga tanpa akses listrik dan (5) desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai. (6) rasio anak tidak bersekolah; (7) rasio Rumah Tangga tanpa akses air bersih; (8) rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dan (9). rasio Rumah Tangga tanpa fasilitas BAB (Buang Air Besar).

Selain itu pengukuran kesejahteraan rumah tangga atau keluarga juga dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, dapat pula dilihat dari indikator pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis pada dokumen perencanaan pangan, diketahui bahwa alokasi pengeluaran penduduk di Kabupaten Bandung lebih banyak untuk makanan dibandingkan non makanan. Alokasi pengeluaran pangan terbanyak penduduk Kabupaten Bandung adalah kelompok makanan dan minuman jadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kabupaten Bandung lebih sering membeli makanan dan minuman dibanding masak sendiri.

Setelah makanan dan minuman jadi, pengeluaran makanan yang paling tinggi adalah tembakau dan sirih yang menjadi pengeluaran pangan kedua terbesar setelah makanan dan minuman jadi. Sedangkan untuk kelompok padi-padian merupakan pengeluaran terbesar ketiga setelah tembakau dan sirih.

### 3.7 Situasi Konsumsi Pangan

Tujuan penyelenggaraan pangan adalah mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat dipengaruhi hasil interaksi antara kondisi makro ekonomi dan keputusan mikro ekonomi. Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pangan diukur dari skor PPH.

PPH merupakan indikator kualitas konsumsi yang menunjukkan keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Semakin mendekati skor PPH 100, konsumsi masyarakat semakin ideal untuk hidup aktif, produktif, dan berkelanjutan. Pentingnya pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Konsumsi pangan merupakan informasi tentang jenis pangan dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu yang diperoleh melalui konsumsi pangan. Jika melihat analisis daya konsumsi energi dan protein sampai dengan tahun 2020 masih berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG X tahun 2004 (AKE = 2.000 kkal/kap/hari, AKP = 52 gram/kapita/hari). Konsumsi energi, protein, dan skor PPH Kabupaten Bandung berturut-turut sebesar 2.201 kkal/kap/hari (110% AKE); protein 62,1 gr/kap/hari (119,4% AKP); dan 83,3 (93,6% dari target).

Berdasarkan data skor PPH tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki skor PPH sebesar 83,3 hal ini dapat dilihat bahwa konsumsi penduduk sudah cukup beragam tetapi belum mencapai skor ideal dan tidak memenuhi serta menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,3 poin. Faktor penyebab hal tersebut diantaranya konsumsi penduduk Kabupaten Bandung kurang beragam pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah.

Kontribusi energi didominasi oleh beras (65%) dan terigu (34,8%), namun pengeluaran makanan untuk kelompok padi-padian pada tahun 2019 menurun sebesar 11,15% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya trend menurunnya konsumsi beras di Kabupaten Bandung. Tetapi ketersediaan pangan pengganti beras dan terigu yakni jagung dan umbi-umbian masih jauh dari kebutuhan. Jagung hanya tersedia 1 kkal/kapita/hari (0,4 kg/kapita/tahun). Adapun ubi kayu hanya tersedia 35 kkal/kap/hari (9,9 kg/kap/tahun), ubi jalar hanya 6 kkal/kap/hari (2,5 kg/kap/tahun) dan kentang hanya 8 kkal/kap hari (7,0 kg/kap/tahun). Padahal untuk memperoleh skor PPH yang ideal dan diversifikasi pangan pokok yang sukses, setidaknya umbi-umbian tersedia sebanyak 144 kkal/kapita/hari. Dengan demikian, kebijakan

pengembangan komoditas umbi-umbian dan jagung di Kabupaten Bandung harus dilakukan sejak hulu yaitu produksi yang memadai atau pasokan dari daerah lain.

Kelompok pangan selanjutnya adalah pangan hewani. Kelompok pangan ini terdiri dari daging ruminansia, daging unggas, telur, susu dan ikan. Pangan hewani yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk kabupaten bandung adalah ikan, daging unggas, telur, daging ruminansia dan susu. Sedangkan untuk kelompok pangan minyak dan lemak, penduduk kabupaten Bandung didominasi oleh minyak kelapa sawit.

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

Tabel 7 Perkembangan Skor PPH Kabupaten Bandung

No	Kelompok Pangan	Konsumsi energi (kkal/kap/hari)								Konsumsi Protein (gram/kap/hari)								Skor PPH KONSUMSI PANGAN							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi-padian	1.167	1.289	1.280	1.257	1.482	1.419,5	1.397	1.383	27,05	27,05	29,7	29,7	32,9	31,7	32,3	31,8	25	25	25	25	25	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	31	43	44	53	34	76,0	48	43	0,34	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,6	0,6	0,8	1,1	1,1	1,2	0,8	1,9	1,2	1,1
3	Pangan Hewani	133	176	192	199	213	260,0	233	235	12,35	15,1	16,4	16,4	18,1	21,7	18,3	18,9	13,3	17,6	17,6	18,5	21,3	24,0	23,3	23,5
4	Minyak dan Lemak	231	291	300	290	319	316,5	249	269	0,07	0,1	0,1	0,1	0	0,0	0,0	0,0	5	5	5	5	5	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	9	14	15	20	14	12,5	6	5	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1
6	Kacang-kacangan	43	56	56	61	57	65,9	60	64	4,47	5,8	5,7	5,7	6,1	7,1	6,2	6,4	4,3	5,6	5,2	5,7	5,7	6,6	6,0	6,4
7	Gula	66	75	73	76	79	82,1	46	49	0,16	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	1,7	1,9	1,7	1,8	2,0	2,1	1,2	1,2
8	Sayur dan Buah	67	71	79	84	75	78,9	87	84	2,43	2,3	2,5	2,5	2,8	2,5	2,7	2,7	16,9	17,8	18,3	19,7	18,9	19,7	21,8	21,0
9	Lain-lain	19	40	36	39	44	35,8	66	68	1,11	1,7	1,6	1,6	1,2	0,9	1,3	1,4	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>1.768</b>	<b>2.055</b>	<b>2.075</b>	<b>2.083</b>	<b>2.321</b>	<b>2.347,3</b>	<b>2.193</b>	<b>2.201</b>	<b>2.193</b>	<b>55,8</b>	<b>56,9</b>	<b>57,0</b>	<b>62,1</b>	<b>65,2</b>	<b>109,6</b>	<b>62,1</b>	<b>109,6</b>	<b>74,3</b>	<b>74,4</b>	<b>77,3</b>	<b>79,3</b>	<b>84,6</b>	<b>83,6</b>	<b>83,3</b>

### 3.8 Gambaran Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung

Data konsumsi pangan, ketersediaan pangan dan akses pangan yang telah diuraikan diatas merupakan gambaran secara umum potret ketahanan pangan di Kabupaten Bandung. Dan berdasarkan dokumen perencanaan pangan, ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung sudah cukup memadai dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein penduduk yang ditandai dengan persentase AKE (102,2%) dan KP (116,2%).

Nilai PPH Kabupaten Bandung sebesar 90,2 menunjukkan ketersediaan pangan cukup beragam. Kondisi ketersediaan pangan tersebut berasal dari produksi wilayah sendiri dan pengadaan dari luar wilayah.

Produksi pangan kabupaten Bandung sendiri belum dapat memenuhi kebutuhan pangan wilayahnya, hal ini ditunjukkan dengan presentasi AKE 35,6% dan AKP 47,6% ada analisis kemandirian pangan dalam dokumen Perencanaan Pangan Kabupaten Bandung. Berdasarkan daya dukung pangan, komoditas pangan yang mengalami surplus produksi adalah jagung, singkong, ubi jalar, kentang, susu, dan sayur. Sedangkan komoditas lainnya mengalami defisit. Hal ini menjelaskan mengapa persentase AKE dan AKP kemandirian pangan sangat rendah

Pada tahun 2018 persentase kemiskinan di Kabupaten Bandung sebesar 6.65%, lebih rendah dari persentase kemiskinan di Jawa Barat (7.83%) dan Nasional (10.12%). Berdasarkan persentase tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 6.65% penduduk di Kabupaten Bandung tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki pengeluaran untuk makanan maupun non makanan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu hambatan masyarakat dalam akses pangan secara ekonomi.

Hampir separuh desa di Kabupaten Bandung mengalami kerawanan pangan dan gizi, hal ini ditunjukkan pada analisis kerawanan pangan pada Dokumen Perencanaan Pangan dimana desa rawan pangan prioritas 1 sebanyak 25,2% dan prioritas 2 sebanyak 20%. Kerawanan pangan menjadi satu indikasi bahwa komoditas pangan masih sulit untuk diakses baik secara fisik ataupun ekonomi di wilayah-wilayah yang rentan. Salah satu penyebab kerawanan pangan ini karena pelaku logistik (distribusi) di wilayah tersebut tidak mampu menyediakan kebutuhan pangan masyarakatnya. Hal ini diketahui rasio warung terhadap rumah tangga, terdapat 140 desa/kelurahan yang tergolong prioritas 1 dan 2 (50%), artinya jumlah warung yang menyediakan kebutuhan pangan masih relatif kurang jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Sama halnya dengan indikator rasio warung terhadap rumah tangga, pada indikator toko terhadap rumah tangga pun terdapat 140 desa/kelurahan (50%) yang tergolong prioritas 1 dan 2. Dengan demikian, warung dan toko yang menyediakan pangan di Kabupaten Bandung

masih belum cukup. Kabupaten Bandung perlu menyediakan pusat jual beli baik berupa pasar maupun warung dan toko yang dapat terjangkau oleh masyarakat.

Dibalik permasalahan diatas Kabupaten Bandung memiliki beberapa potensi antara lain beberapa komoditas pangan yang mengalami surplus seperti jagung, singkong, ubi jalar, kentang, susu, dan sayur. Hal ini menjadi tantangan lainnya untuk mengoptimalkan komoditas surplus tersebut menjadi komoditas yang lebih berdaya saing sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan lainnya adalah pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produktifitas dan pengadaan dari wilayah lain.

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

## BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini akan membahas mengenai apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh petani/peternak terkait dengan proses produksi sector pertanian. Pembahasan ini merupakan acuan yang akan digunakan untuk merencanakan rencana-rencana apa yang diperlukan oleh seluruh pihak baik petani, pemerintah, dan swasta dalam mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### 4.1 Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam sub sector tanaman pangan dan hortikultura terdapat beberapa permasalahan yang sering kali dihadapi oleh petani di Kabupaten Bandung yaitu:

- a. Masih langkanya ketersediaan saprotan seperti pupuk, bibit, pestisida, dll  
Permasalahan dalam hal ini adalah mengenai ketersediaan saprotan, bibit, pestisida, meskipun ada, jarak yang perlu ditempuh petani untuk mendapatkannya sangat jauh. Antisipasi lain dari kelangkaan pupuk adalah harus tersedianya alat pembuatan pupuk organik (APPO) sehingga para petani mampu membuat dan menyediakan pupuk sendiri, Dari total 255 buah APPO 239 masih dalam kondisi baik dan 16 buah dalam keadaan rusak. Perbaikan alat yang rusak harus secepatnya dilakukan agar tidak menghambat kinerja petani.
- b. Produksi pertanian umumnya bersifat musiman, kuantitas serta kualitas produksinya tidak seragam dan sulit untuk ditentukan/prakiraan, voluminus, sangat tergantung pada musim dan mudah rusak. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, menjaga kualitas serta untuk menambah nilai jual agar pendapatan petani tetap tinggi maka diperlukan sarana pengolahan hasil pertanian disekitar lokasi. Sarana pengolahan hasil dapat dibuat dalam bentuk perseorangan atau perusahaan.
- c. Semakin sulitnya tenaga kerja atau buruh tani dalam kegiatan pertanian. Akibat menurunnya oreintasi atau minat masyarakat terutama generasi muda terhadap pertanian akan mengakibatkan semakin langkanya buruh tani. Antisipasi permasalahan tersebut adalah perlu adanya upaya penerapan teknologi sebagai pengganti tenaga kerja mulai dari penyiapan dan pengolahan lahan seperti traktor, alat tanam padi sampai alat pemanen.
- d. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu sehingga dapat memperbesar gagal panen dikarenakan kesalahan jadwal tanam, kekeringan, serta gangguan hama dan penyakit

- e. Lemahnya kegiatan edukasi petani sehingga berdampak pada kekurangannya dopsi inovasi dan ketidakpastian pasar sehingga berdampak pada ketidakpastian harga jual komoditas.

#### 4.2 Sub Sektor Peternakan

Peternakan di Kabupaten Bandung terdiri atas komoditas sapi perah, sapi potong, domba dan kambing, serta produk turunannya. Berdasarkan hasil analisis pada laporan logistik Peternakan diketahui bahwa masalah dan kendala pada peternakan di Kabupaten Bandung adalah:

- a. Permasalahan terkait produksi dengan sub sector pembibitan, pakan, pengolahan pasca panen dan pengembangan usaha.

Produksi produk ternak mengalami penurunan kuantitas dan kualitas yang dipengaruhi dengan kurangnya ketersediaan bibit yang berkualitas, sehingga perlunya pusat pembibitan di setiap sentra. Pusat pembibitan yang sudah ada dapat dioptimalkan kembali seperti pada komoditas sapi perah. Ternak sapi potong, domba dan kambing belum memiliki pusat pembibitan, dapat melakukan kemitraan dengan industri ataupun peternak sehingga menjadikan suatu daerah atau kecamatan menjadi sentra bibit.

Para peternak memperoleh input pakan dengan mencari hijauan, serta membeli konsentrat dan limbah pertanian dari koperasi, petani, maupun mitra. Belum optimalnya memanfaatkan teknologi pengolahan pakan dari limbah pertanian, sehingga diperlukannya integrasi pemanfaatan lahan dan limbah.

Dalam meningkatkan produktivitas penanganan pasca panen sangat mempengaruhi kualitas produk dan harga jual, kondisi yang ditemukan di lapangan higienitas dan sanitasi penanganan produk yang masih kurang hal ini di tunjang dari minimnya sarana dan prasarana di unit penyimpanan, pengolahan, dan distribusi serta kurangnya kesadaran dan kedisiplinan peternak dalam menjaga higienitas.

Keterbatasan akses permodalan untuk pengembangan usaha dimana peternak memiliki skala kepemilikan ternak yang masih rendah, kurangnya soft skill usaha peternakan, dan belum optimal dalam pemanfaat limbah sebagai nilai tambah usaha.

- b. Permasalahan terkait kelembagaan dengan sub sector kelompok ternak, kemitraan dan beberapa Lembaga

Permasalahan pada komponen kelembagaan yang dihadapi adanya penurunan jumlah peternak hal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lemahnya kelembagaan kelompok ternak, peternak beralih profesi dengan menjual ternak dan tidak ada regenerasi usaha ternak disebabkan kurangnya minat pemuda untuk beternak. Kelompok ternak yang belum



optimal dan aktif dalam mengembangkan kelompok karena kurangnya komitmen dan tanggung jawab dari anggota, kurangnya edukasi dan pendampingan peternak serta keterbatasan akses informasi dan pemanfaatan teknologi. Selain itu pula terdapat masalah pada rph dan kemitraan yang hampir sama dengan permasalahan pada kelompok ternak.

- c. Permasalahan terkait distribusi dengan sub sector sarana prasarana, biaya logistik, dan penyusutan

Permasalahan dalam proses distribusi ternak yang dihadapi pelaku distribusi karakteristik komoditas produk peternakan yang mudah rusak serta tingkat penyusutan yang tinggi pada hewan hidup selama perjalanan. Hal ini dipengaruhi sarana dan prasarana yang belum optimal dari moda angkutan yang belum terstandar, kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik dan kurang memadai untuk mendukung kelancaran lalu lintas logistik di Kabupaten Bandung, selain itu pemilihan jarak dan waktu tempuh perjalanan yang belum efisien dan keterbatasan sumber daya manusia/jasa logistik peternakan sehingga rantai pasok kurang efisien jika volume pengangkutan rendah. Dengan kondisi permasalahan tersebut akan meningkatkan biaya operasional dan berdampak tingginya harga jual di konsumen.

- d. Permasalahan terkait pemasaran dengan sub sector ketersediaan produk yang fluktuatif, disparitas harga, jaminan harga dan akses pasar

Tinggi fluktuasi dan disparitas harga di setiap pelaku rantai pasok dari tingkat peternak hingga di konsumen, karena belum adanya standarisasi harga, ketersediaan produk dan kualitas produk yang fluktuatif. Selain itu terjadi persaingan harga dengan produk impor yang lebih murah dan mencukupi permintaan serta varietas produk. Pemasaran produk peternakan belum memiliki akses yang luas, memanfaatkan marketplace dan pola kemitraan.

### **4.3 Sub Sektor Perikanan**

Dalam sektor perikanan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan. permasalahan yang diidentifikasi dari hasil kajian sistem logistik ikan Kabupaten Bandung adalah:

- a. Komponen Pengadaan

Pada komponen pengadaan ikan di Kabupaten Bandung terdapat 3 jenis pengadaan ikan yaitu pengadaan ikan tangkap segar, ikan tangkap bahan baku industri pengolahan. Dan

ikan budidaya air tawar. Pengadaan ikan tangkap segar dan bahan baku industri pengolahan berasal dari luar daerah yaitu Pelabuhan-pelabuhan tangkap ikan yang berada di pantai utara dan selatan Jawa. Sedangkan untuk pengadaan ikan budidaya air tawar berasal dari dalam kabupaten dan kabupaten sentra produksi pembesaran ikan.

Permasalahan yang dihadapi pada proses produksi ikan budidaya adalah adanya alih fungsi lahan, padat tebar rendah, modal usaha tani budidaya tinggi, kemampuan modal usaha petani rendah, infrastruktur pengairan kualitas menurun dan teknologi usaha tani yang masih terbatas.

Sedangkan untuk pengadaan ikan air laut segar permasalahan yang dihadapi adalah pedagang ikan segar di Kabupaten Bandung adalah sumber pasokan ikan segar tidak berasal dari daerah sentra produksi ikan tangkapnya langsung. Sumber pasokan ikan segar air laut sebagian besar berasal dari pedagang besar yang berada di pasar induk muara baru Jakarta. Masalah yang dihadapi untuk mendapatkan pasokan dari sentra produksi langsung adalah tidak adanya kepastian jumlah dan variasi ikan yang dibutuhkan. Kualitas ikan segar asal daerah produksi masih rendah karena tidak menerapkan rantai dingin dengan benar. Masalah lain yang dihadapi dalam pengadaan ikan segar adalah kepastian variasi dan jumlah ikan dari hasil tangkapan nelayan. Kondisi ini disebabkan alat tangkap, kapasitas kapal yang digunakan, lokasi penangkapan, dan faktor musim.

Untuk pengadaan ikan untuk bahan baku industri produk olahan ikan, permasalahan yang terjadi adalah Pedagang besar yang menjadi sumber bahan baku ikan olahan tidak banyak. Lokasi sumber pasokan ini menjadi jauh dari pelaku industri kecil yang ada di Kabupaten Bandung. Teknologi pengolahan ikan yang masih sederhana, pelaku yang menekuni usaha pengolahan dengan modal usaha kecil (UMKM), pengetahuan tentang varian produk olahan masih sangat terbatas, dan kemasan yang digunakan masih sangat sederhana sehingga tingkat keamanan dan kebersihan dari produk relatif rendah.

b. Komponen Penyimpanan

Permasalahan pada komponen penyimpanan dalam sistem logistik ikan yaitu masalah penyimpanan ikan hidup dari budidaya air tawar dan masalah penyimpanan ikan segar tidak tersedia di pasar-pasar tradisional dan di pedagang besar disentra produksi. Di pasar tujuan penjualan tempat yang digunakan juga masih sangat sederhana. Permasalahan penyimpanan untuk ikan segar hasil tangkap adalah kondisi ikan segar ukuran kecil sebagian besar tidak kuat disimpan lebih dari tiga hari, dan untuk bahan baku industri pengolahan ikan, tempat penyimpanan yang tersedia di PIM masih terbatas kapasitasnya.

c. Komponen Transportasi

Permasalahan transportasi dalam sistem logistik ikan yang ada di kabupaten Bandung adalah ketersediaan kendaraan berpendingin yang mendukung proses rantai dingin (Thermoking). Selain sarana transportasi ikan beku dan segar, permasalahan regulasi atau izin kendaraan khusus angkutan ikan hidup yang belum ada, serta tingkat keamanan kendaraan dalam proses pengiriman ikan. Proses pengiriman harus dilakukan dengan cepat dan dalam kondisi suhu udara dingin (malam/Subuh) untuk menghindari berkurangnya kandungan oksigen dalam kemasan dan menghindari kemacetan. Dalam proses pengiriman ikan hidup ini pengemudi sering kena Tilang di jalan raya karena izin kendaraan dan cara mendarai kendaraan yang diluar aturan, dampaknya biaya transportasi ikan hidup jadi meningkat.

d. Komponen Distribusi

Permasalahan pada komponen distribusi dalam sistem logistik ikan adalah karakteristik komoditas ikan yang mudah rusak atau busuk menyebabkan tingkat susut juga tinggi. Kondisi seperti ini yang menyebabkan tingkat disparitas antar waktu dan lokasi komoditas ikan tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Sebagian pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bandung masih sangat minim sarana pendukung untuk komoditas ikan. Untuk ikan hidup butuh bak, pompa air, dan oksigen sedangkan ikan segar butuh tempat penyimpanan stok yang menggunakan alat pendingin (Coldstorage). Permasalahan lain yang dihadapi pedagang pengecer adalah ketersediaan variasi ikan segar di Kabupaten Bandung masih rendah, harga ikan dipengaruhi oleh ketersediaan dan harga komoditi sumber protein hewani lainnya seperti daging ayam, telur, dan daging sapi. Pedagang ikan sering mengalami kerugian ketika harga daging ayam dan telur mengalami penurunan atau terjadi over supply

## **BAB V RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) KABUPATEN BANDUNG**

Dalam perencanaan Sektor pertanian akan dibahas mengenai 2 pencapaian yang ingin dicapai untuk mendukung misi kepada daerah Kabupaten Bandung, yaitu misi 1 dan misi 5. Tujuan yang ingin dicapai pada misi 1 adalah mengenai membangkitkan Daya Saing dengan didorong oleh peningkatan daya saing sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Dimana dalam pembahasan kali ini untuk mencapai hal tersebut akan diwujudkan salah satu caranya adalah melalui kesejahteraan petani.

Selanjutnya untuk misi 5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat Lemah. Misi ini didorong salah satunya oleh menurunnya masalah pangan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, akan diwujudkan dengan salah satu cara yaitu melalui ketahanan pangan. Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

### **5.1 Kesejahteraan Petani**

Untuk kesejahteraan petani, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung menyebutkan bahwa dalam pengembangan logistic pangan akan dititikberatkan pada peningkatan aksesibilitas pangan dan juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan swasembada pangan sebagai akibat dampak terganggunya jalur distribusi pangan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Dengan adanya pengembangan logistic pangan, diharapkan dapat menciptakan kepastian harga pasar, informasi pasok yang tersedia, transparansi biaya transaksi, dan konsumsi pangan sehat bernutrisi.

Titik berat pada kesejahteraan ini akan difokuskan pada 8 strategi dasar yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, inovasi dan kreativitas, informasi dan teknologi, infrastruktur, regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan investasi, serta koordinasi dan Kerjasama.

Pada tahun pertama akan difokuskan kepada penguatan database pangan real-time dan factual, serta peningkatan produksi pangan melalui peningkatan SDM. Untuk tahun kedua akan

difokuskan pada penyusunan regulasi, dimana regulasi ini akan berkaitan dengan penyusunan izin dan peraturan mengenai alat transportasi. Di tahun ketiga dan keempat akan fokus pada pengembangan infrastruktur, dimulai dari penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana dari hulu ke hilir. Dan untuk tahun kelima akan fokus pada Kelembagaan, Inovasi dan kreativitas dan koordinasi dan Kerjasama terkait dengan kelembagaan dan pengembangan inovasi.

Dalam peningkatan kesejahteraan petani, Kawasan pengembangan akan tetap dilakukan pengembangan berdasarkan kecamatan yang memiliki komoditas unggulan. Berdasarkan Masterplan perekonomian Kabupaten Bandung, sector unggulan pada setiap kecamatan didapatkan melalui perhitungan nilai produksi masing-masing sub-sektor pertanian. Dari hasil perhitungan produksi menunjukkan bahwa terdapat 13 Kecamatan dengan sub-sektor unggulan tanaman pangan, 7 Kecamatan dengan sub-sektor unggulan hortikultura, 9 Kecamatan dengan sub-sektor unggulan perkebunan, 6 kecamatan dengan sub-sektor unggulan peternakan, 9 kecamatan dengan sub-sektor unggulan biofarmaka, 14 kecamatan dengan sub-sektor unggulan buah-buahan, serta 10 kecamatan dengan sub-sektor unggulan perikanan. Berikut adalah data terkait sub-sektor unggulan berdasarkan kecamatan.

Tabel 8 Sub-sektor pertanian unggulan berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Sub sektor pertanian
1	Ciwidey	Perkebunan, peternakan, Buah-buahan
2	Rancabali	Perkebunan, Buah-buahan
3	Pasirjambu	Perkebunan, Buah-buahan
4	Cimaung	Tanaman Pangan, perikanan, Hortikultura, Buah-buahan
5	Pangalengan	Perkebunan, peternakan, Hortikultura, Buah-buahan
6	Kertasari	Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Buah-buahan
7	Pacet	Tanaman Pangan, Perkebunan, Biofarmaka, perikanan, Hortikultura, Buah-buahan
8	Ibun	Perkebunan, peternakan, Biofarmaka. Perikanan, Hortikultura, Buah-buahan

No	Kecamatan	Sub sektor pertanian
9	Paseh	Tanaman Pangan, Perkebunan, Biofarmaka, perikanan, Hortikultura, Buah-buahan
10	Cikancung	Perkebunan, Biofarmaka, Buah-buahan
11	Cicalengka	Tanaman Pangan
12	Nagreg	Tanaman Pangan, Biofarmaka, perikanan
13	Rancaekek	Tanaman Pangan, perikanan
14	Majalaya	Tanaman Pangan, perikanan
15	Solokanjeruk	Tanaman Pangan
16	Ciparay	Tanaman Pangan, Biofarmaka, perikanan
17	Baleendah	
18	Arjasari	Tanaman Pangan, peternakan, Hortikultura
19	Banjaran	Tanaman Pangan
20	Cangkuang	Biofarmaka
21	Pamengpeuk	
22	Katapang	
23	Soreang	Buah-buahan
24	Kutawaringin	Tanaman Pangan, Buah-buahan
25	Margaasih	
26	Margahayu	
27	Dayeuhkolot	
28	Bojongsoang	Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Sub sektor pertanian
29	Cileunyi	Biofarmaka, perikanan
30	Cilengkrang	Peternakan, Buah-buahan
31	Cimencyan	Biofarmaka, Hortikultura, Buah-buahan

Sumber: Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan sub-sektor unggulan tersebut, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai kesejahteraan petani dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

Tabel 9 Rencana Progran dan Kegiatan

Strategi Dasar	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
informasi dan teknologi	Penguatan database pangan real-time dan faktual	Pengembangan basis data sektor pertanian	Pengumpulan dan analisis data dan informasi pangan dan sektor pertanian	Penyediaan, updating dan integrasi data melalui sistem informasi dari penyuluh pertanian	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					
				Penyediaan, updating dan integrasi data melalui sistem informasi di tingkat pedagang pasar		- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UKM				
		Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan komunikasi	penyediaan platform database logistik sektor pertanian	Pengembangan sistem informasi manajemen logistik peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir	- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik - Sekretariat Daerah - Dinas PUTR					
				Pengembangan sistem informasi ketersediaan pakan dan harga pakan	- Dinas Perkimtan - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Bappeda - BPS					
		Penyediaan akses pasar produk pertanian dan pengoptimalan market place	Pemasaran produk pertanian	Pengembangan akses pasar bagi pelaku usaha peternakan	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					
				peningkatan promosi online dan offline market place pertanian	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
				Peningkatan pembelian produk pertanian	- Dinas Koperasi dan UKM					
		Sumber Daya Manusia	Peningkatan produksi pangan melalui peningkatan SDM	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM petani dan peternak	Peningkatan kemampuan pembibitan/pembenihan komoditas unggulan	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Peningkatan kemampuan teknik pengolahan pakan										
peningkatan kemampuan teknik pengolahan produk pertanian										
peningkatan SDM industri pengolahan limbah										
Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh pertanian / peternakan dan paramedis/ dokter hewan										
Peningkatan SDM Teknik budidaya										
Pengembangan Jasa logistik										
Peningkatan SDM dalam manajerial										
Regulasi	Penyusunan Regulasi	Penyusunan Izin dan peraturan alat transportasi	Penyusunan izin dan peraturan alat transportasi	Menyusun regulasi angkutan khusus pertanian	Dinas Perhubungan					
				Pengembangan layanan kluster unit jasa logistik						



Strategi Dasar	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana dari hulu ke hilir	Perbaikan dan penyediaan infrastruktur produksi	- Dinas PUTR Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					
				Pengadaan sarana dan prasarana infrastruktur pengolahan						
				Pengadaan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan transportasi						
				pengadaan sarana dan prasarana infrastruktur penyimpanan/gudang						
				pengadaan sarana dan sarana dan prasarana infrastruktur distribusi						
				Pengembangan pasar tradisional						
				Pengembangan marketplace produk pertanian Kabupaten Bandung						
			Kesehatan Ternak dan masyarakat veteriner	penguatan infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat veteriner						
				peningkatan mekanisme pengawasan dan pengendalian penyakit hewan						
Kelembagaan	Penguatan kelembagaan di sektor pertanian	penguatan SDM kelembagaan petani dan peternak	penguatan SDM kelembagaan petani dan peternak	Penguatan pengembangan SDM kelompok tani dan peternak	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - Dinas Koperasi dan UKM					
				Penguatan pengembangan SDM Koperasi						
				Penguatan pengembangan SDM UPTD pasar dan pasar hewan						
				Fasilitasi kolaborasi dengan pelaku usaha						
				Bantuan saprotan dan akses permodalan						
Pembiayaan dan investasi	Peningkatan kemudahan akses permodalan	Peningkatan kemudahan akses permodalan	Pegembangan akses permodalan dan pengembangan usaha kemitraan	Peningkatan kemudahan akses permodalan antar lembaga	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					
				Optimalisasi lembaga keuangan mikro/desa						
Inovasi dan Kreativitas	Pengembangan Inovasi	Pengembangan teknologi dalam budidaya sektor pertanian	Pengembangan SDM dan pengkajian alih teknologi	Melaksanakan uji coba teknologi pertanian	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					
				Peningkatan keragaan fasilitas dan infrastruktur riset melalui investasi riset		- Perguruan Tinggi, - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan				
Koordinasi dan kerjasama				Kolaborasi dan Koordinasi dalam pengkajian dan penelitian dalam sektor pertanian						

## 5.2 Ketahanan Pangan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai kondisi, permasalahan dan beberapa kajian terdahulu, diperlukan adanya sebuah sinergitas yang berguna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dan mensinkronkan rencana program dan kegiatan yang telah dihasilkan pada kajian-kajian sebelumnya.

Hal yang perlu dilakukan pertama adalah menentukan terlebih dahulu kecamatan mana yang menjadi prioritas utama pembangunan. Penilaian prioritas dinilai berdasarkan produktivitas kecamatan tersebut dalam sector pertanian. Pada beberapa kajian yang telah dilakukan telah didapatkan beberapa kecamatan yang dapat mengelompokkan jenis Kawasan. Namun kajian tersebut dinilai kurang lengkap sehingga kedepannya diperlukan tambahan kajian tidak hanya produktivitas, namun juga dapat menambahkan faktor lain seperti kondisi infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana pendukung, aspek kelembagaan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil kajian Masteplan Pertanian didapatkan pengelompokkan Kawasan berdasarkan produktivitas sebagai berikut.

### a. Tahap Penumbuhan

Penumbuhan Kawasan dilaksanakan pada Kawasan eksisting yang belum berkembang dengan titik berat pengembangan pada aspek hulu (benih/bibit, irigasi, alsintan), penerapan teknologi budidaya, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan kegiatan, penyuluhan pertanian.

Pengelompokkan Kawasan pada tahap ini dinilai berdasarkan tingkat produktivitasnya. Dengan kriteria yaitu rata-rata luas panen < Kabupaten dan Produksi > rata-rata Kabupaten.

### b. Tahap Pengembangan

Pengembangan Kawasan dilaksanakan pada kondisi yang telah cukup berkembang dengan titik berat pengembangan on farm (optimalisasi lahan, pengamanan produksi, antisipasi Dampak Perubahan iklim (DPI)), kelembagaan tani, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan.

Pengelompokkan Kawasan pada tahap ini dinilai berdasarkan tingkat produktivitasnya. Dengan kriteria yaitu Rata-rata luas panen dan produksi > rata-rata Kabupaten.

### c. Tahap Pemantapan

Tahap pemantapan Kawasan dilaksanakan pada Kawasan yang telah berkembang dengan titik berat pengembangan pada penguatan kelembagaan, peningkatan mutu, penguatan

akses pemasaran, pengembangan pasca panen, pengembangan olahan, klinik pertanian, pembangunan/perbaikan jalan produksi.

Pengelompokkan Kawasan pada tahap ini dinilai berdasarkan tingkat produktivitasnya. Dengan kriteria yaitu rata-rata produksi dan produktivitas kecamatan > Rata-rata provinsi.

Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan jenis Kawasan tersebut berdasarkan yang dinilai berdasarkan produktivitas komoditas selama 10 tahun terakhir (2007 – 2017). Selanjutnya perbedaan kelas Kawasan tersebut menjadi dasar upaya penguatan yang akan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, untuk lebih jelasnya untuk Kawasan pertanian berdasarkan tahan pertumbuhan adalah sebagai berikut.

Tabel 11 Klasifikasi Kawasan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung

Sub Sektor Pertanian	Komoditas	Jenis Kawasan	Kecamatan
Tanaman Pangan	Padi	<b>Penumbuhan</b>	Kutawaringin
	Jagung		Dayeuhkolot, Kutawaringin, Margahayu
	Kedelai		Baleendah, Banjaran, Cangkuang, Cilengkrang, Cileunyi, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Katapang, Majalaya, Margaasih, Margahayu, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali, Rancaekek, Solokanjeruk, Soreang
	Ubi Kayu		Kutawaringin
	Padi	<b>Pengembangan</b>	Arjasari, Cikancung, Cimenyan, Kertasari, Nagreg, Rancabali
	Jagung		Arjasari, Beleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Ciparay, Katapang, Majalaya, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Rancaekek, Soreang
	Kedelai		Cimaung, Dayeuhkolot, Kertasari, Kutawaringin, Pacet
	Ubi Kayu		Ciparay, Dayeuhkolot, Majalaya, Rancaekek, Soreang

Sub Sektor Pertanian	Komoditas	Jenis Kawasan	Kecamatan
	Padi	<b>Pemantapan</b>	Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibum, Katapang, Majalaya, Margaasih, Margahayu, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancaekek, Solokanjeruk, Soreang
	Jagung		Cikancung, Cimenyan, Ciwidey, Ibum, Kertasari, Margaasih, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali, Solokanjeruk
	Kedelai		Arjasari, Bojongsoang, Cicalengka, Cikancung
	Ubi Kayu		Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciwidey, Ibum, Katapang, Kertasari, Margaasih, Margahayu, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali, Solokanjeruk
Hortikultura	Bawang Merah	<b>Penumbuhan</b>	Cikancung, nagreg, paseh, rancaekek
	Kentang		Cicalengka
	tomat		Baleendah, banjaran, cangkuang, cicalengka, cimenyan, ciparay, katapang, kutawaringin, nagreg, pacet, rancaekek
	Kubis		Arjasari, cangkuang
	Strawberry		Rancabali
	Bawang Merah	<b>Pengembang</b>	Arjasari, Banjaran, Cileunyi,
	Cabai		Arjasari, cangkuang, Cimaung, cimenyan, Ciparay, Pacet, pangalengan, Paseh, rancaekek dan Solokanjeruk
	Kentang		Cilengkrang, cimenyan, ibun, paseh.
	tomat		Cikancung, cileunyi, cimaung, ciwidey, ibun, pangalengan, paseh, pasirjambu, rancabali, solokanjeruk, soreang
	Kubis		Cicalengka, cileunyi, pacet, paseh
	Kentang	<b>Pemantapan</b>	Cikancung, ciwidey, kertasari, pangalengan, pasirjambu, rancabali
	Tomat		Arjasari

Sub Sektor Pertanian	Komoditas	Jenis Kawasan	Kecamatan
	Kubis		Cikancung, cilengkrang, cimaung, cimenyan, ciwidey, ibun, kertasari, pangalengan, pasirjambu, rancabali
	Strawberry		Ciwidey
Perkebunan	Kopi	<b>Penumbuhan</b>	Rancaekek, Solokanjeruk, Soreang
	Teh		Ciwidey
	Tembakau		Baleendah
	Kopi	<b>Pengembangan</b>	Baleendah, Banjaran, Cangkuang, Katapang, Majalaya, Nagreg
	Teh		-
	Tembakau		Ciparay, Rancabali
	Kopi	<b>Pemantapan</b>	Arjasari, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Ibum, Kertasari, Kutawaringin, Pacet, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali
	Teh		Kertasari, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali
	Tembakau		Arjasari, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Ciwidey, Ibum, Kutawaringin, Nagreg, Pacet, Paseh, Rancabali, Soreang
Peternakan	Sapi perah dan Domba	<b>Penumbuhan</b>	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibum, Katapang, Kutawaringin, Pangalengan, Rancabali, Majalaya, Margaasih, Margahayu, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Soreang
	Sapi Perah	<b>Pengembangan</b>	Kertasari, Pasirjambu
	Domba		Pacet
	Sapi Perah	<b>Pemantapan</b>	Pangalengan
Domba	Ibum		
Perikanan	Benih lele, Benih nila, Benih mas	<b>Pemantapan</b>	Cimaung, Kertasari, Pacet, Ibum, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Cileunyi

Berdasarkan pembagian jenis Kawasan tersebut akan dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak perangkat daerah yang berguna untuk pengembangan Kawasan. Dalam pengembangannya, akan direncanakan berbagai program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait.

Melihat dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Bandung, maka rencana pengembangan Kawasan ini akan dilaksanakan dengan pertamanya dilakukan penguatan terhadap (1) Peningkatan ketersediaan bibit/benih yang berkualitas di tingkat peternak, (2) Pengembangan Kapasitas SDM, (3) Penguatan sarana dan prasarana, (4) penguatan Kerjasama dan kemitraan, (5) Penguatan kelembagaan dan (6) Percepatan adopsi teknologi.

Berikut adalah rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten.

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

Tabel 11 Rencana Program dan Kegiatan

Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Kepmendagri 50' 21)	Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Indikator (Kepmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan					
							2022	2023	2024	2025	2026	
Kawasan Penumbuhan	Tanaman Pangan, hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Distan						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Distan						
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Distan						
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Distan						
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Distan						
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Distan						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Distan						
		Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Distan					
					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Distan					
				Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Distan					
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Distan						
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Distan						

Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Kepmendagri 50' 21)	Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Indikator (Kepmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Kawasan Penumbuhan	Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dispakan					
				Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Dispakan					
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Dispakan					
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Dispakan					
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Dispakan					
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dispakan					



Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Kepmendagri 50' 21)	Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Indikator (Kepmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Kawasan penumbuhan	Tanaman Pangan, Hortikultura	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jaringan irigasi tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	DPUTR, Distan					
				peningkatan jaringan irigasi rawa	panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	DPUTR, Distan					
				Peningkatan jaringan irigasi air tanah	anjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	DPUTR, Distan					
				rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUTR, Distan					
				rehabilitasi jaringan irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	DPUTR, Distan					
				rehabilitasi jaringan irigasi tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	DPUTR, Distan					
				rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	DPUTR, Distan					
		PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pert	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Distan					
		- PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (distan)	- Pembangunan Prasarana Pertanian - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibuat	DPUTR, Distan					
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang direhabilitasi	DPUTR, Distan					
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh yang dipelihara/diperbaiki			DPUTR, Distan							

Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Kepmendagri 50' 21)	Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Indikator (Kepmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Kawasan penumbuhan	Tanaman Pangan, Hortikultura	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Salura Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	DPUTR					
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	DPUTR					
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	DPUTR					
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun						
				Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan						
				Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan penggunaan Sarana pendukung pertanian	Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	Distan					
					Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	Distan					
						Distan					
						Distan					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kolam yang diperbaiki/dibangun	Dispakan						
				Luas lahan yang dibeli	Dispakan						
				jumlah petani yang mendapatkan bantuan alat pengolahan pakan ikan	Dispakan						
	Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah peternak yang kandangnya dibangun atau direnovasi	Distan					

Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Kepmendagri 50' 21)	Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Indikator (Kepmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Pengembangan	Sektor pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Distan					
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Distan					
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Distan					
				Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Distan					
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beropera	Distan					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Diskop UKM					
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Diskop UKM					
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Diskop UKM					
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Diskop UKM					
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Diskop UKM					
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Diskop UKM					

Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Keppmendagri 50' 21)	Kegiatan (Keppmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Keppmendagri 50' 21)	Indikator (Keppmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Pengembangan	Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan Pemeliharaan rumah Potong hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Disperindag, Distan					
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Distan					
				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Distan					
	Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dispakan					
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dispakan					
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Dispakan					
	Pertanian, peternakan dan perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	distan					
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, hortikultura, dan Perkebunan	distan					
				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	distan					
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Distan					
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Distan					
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Distan					

Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Kepmendagri 50' 21)	Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Indikator (Kepmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Pemantapan	Sektor pertanian	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	mlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Diskop UKM					
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	DPMPTSP					
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Diskop UKM					
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diskop UKM					
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Diskop UKM					
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatab Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Diskop UKM					
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Diskop UKM					

Jenis Kawasan	Sektor Pertanian	Program (Kepmendagri 50' 21)	Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Sub Kegiatan (Kepmendagri 50' 21)	Indikator (Kepmendagri 50' 21)	Pelaksana Teknis	Tahun Pelaksanaan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Pemantapan	Sektor pertanian	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dispakan					
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Dispakan					
				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dispakan, Pasar Ikan Modern					
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	distan					
				Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian risiko dan pengulangan penyakit hewan zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	distan					
				Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins	distan					
				Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	distan					

## **BAB VI PENUTUP**

Penyusunan Kajian Sinergitas Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam dimaksudkan untuk mensinergikan rencana-rencana yang sudah dihasilkan dari setiap kajian yang telah dibuat dalam satu dokumen perencanaan yang komperhensif dan saling melengkapi satu sama lainnya. Dan dengan adanya kajian ini dapat mempermudah penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pada saat implementasi nantinya.

Oleh sebab itu penyusunan kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan.

Soreang, Desember 2021

Widiastuti Arini, S.T., M.M